

STRATEGI INDONESIA DALAM PENANGANAN KONTRA-TERORISME DI FORUM INDOMALPHI PADA TAHUN 2017-2021

Sulistyo Yulianto¹, Agus Subagyo², Iing Nurdin³

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia
2. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia
2. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

Terrorism in Southeast Asia, particularly in the border areas between Indonesia, Malaysia, and the Philippines, has become a significant threat to regional stability and security. In response to this challenge, trilateral cooperation through the INDOMALPHI forum was initiated in 2017 to strengthen collective efforts in preventing, deterring, and countering cross-border terrorism. This research analyzes the role of the Indonesian National Armed Forces (TNI) within the INDOMALPHI framework, particularly in terrorism prevention, deterrence, and counteraction in the Sulu Sea region. The findings show that TNI plays a crucial role in joint maritime and aerial patrols, intelligence information exchange, and the execution of integrated military operations with the Malaysian and Philippine armed forces. Furthermore, TNI's presence in border areas, joint military exercises, and involvement in defense diplomacy have significantly bolstered trilateral capabilities in addressing terrorism threats. However, challenges such as operational coordination limitations and the difficult geographic conditions still need to be overcome to enhance the effectiveness of this cooperation. The research highlights the importance of improving technological infrastructure and involving local communities to support the success of trilateral counter-terrorism efforts.

Keywords: trilateral cooperation, INDOMALPHI, counter-terrorism

ABSTRAK

Terorisme di kawasan Asia Tenggara, khususnya di wilayah perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina, telah menjadi ancaman signifikan terhadap stabilitas dan keamanan regional. Sebagai respons terhadap tantangan ini, kerjasama trilateral melalui forum INDOMALPHI diinisiasi pada tahun 2017 untuk memperkuat upaya kolektif dalam mencegah, menangkal, dan menindak aksi terorisme lintas batas. Penelitian ini menganalisis peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kerangka kerja INDOMALPHI, khususnya dalam upaya pencegahan, penangkalan, dan penindakan terorisme di kawasan Laut Sulu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa TNI berperan penting dalam patroli maritim dan udara gabungan, pertukaran informasi intelijen, serta pelaksanaan operasi militer terpadu dengan angkatan bersenjata Malaysia dan Filipina. Selain itu, keberadaan TNI di wilayah perbatasan, latihan militer bersama, dan keterlibatan dalam diplomasi pertahanan turut memperkuat kemampuan trilateral dalam menghadapi ancaman terorisme. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan koordinasi operasional dan kondisi geografis yang sulit masih perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas kerjasama ini. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur teknologi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung keberhasilan upaya kontra-terorisme trilateral.

Kata kunci : Kerjasama Trilateral, INDOMALPHI, Kontra-Terrorisme

PENDAHULUAN

Terorisme telah menjadi salah satu ancaman paling signifikan terhadap keamanan global dan regional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan intensitas ancaman terorisme, negara-negara di kawasan ini telah merespon dengan mengembangkan berbagai strategi dan kerangka kerja untuk menghadapi tantangan tersebut. Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara baik dari segi populasi maupun luas wilayah, memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional, khususnya dalam konteks penanganan terorisme. Sejak awal abad ke-21, Indonesia telah mengalami sejumlah serangan teroris yang signifikan, seperti Bom Bali 2002 dan serangan di Jakarta pada tahun-tahun berikutnya (Ach Fawaidi, 2002).

Pengalaman ini mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas kontra-terorisme dan berkolaborasi lebih erat dengan negara-negara lain di kawasan ini. Salah satu wujud nyata dari kerjasama tersebut adalah partisipasi aktif Indonesia dalam forum trilateral INDOMALPHI, yang melibatkan Malaysia dan Filipina (Andhika, 2022). Forum INDOMALPHI, yang diinisiasi pada tahun 2017, didirikan sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman terorisme dan kejahatan lintas batas di kawasan Laut Sulu dan sekitarnya. Wilayah ini dikenal sebagai jalur pergerakan kelompok-kelompok teroris seperti Abu Sayyaf, yang seringkali melakukan penculikan, penyelundupan, dan serangan teroris yang mengancam keamanan ketiga negara. Forum ini dirancang untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara ketiga negara dalam upaya penanggulangan terorisme melalui berbagai inisiatif, termasuk patroli bersama, pertukaran informasi intelijen, dan operasi militer terpadu.

Indonesia, sebagai salah satu pilar utama dalam forum ini, telah mengembangkan strategi kontra-terorisme yang tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga proaktif. Strategi tersebut mencakup berbagai pendekatan, mulai dari diplomasi keamanan, penguatan kapasitas militer, peningkatan kerjasama intelijen, hingga pemberdayaan masyarakat dalam melawan radikalisasi. Dalam konteks INDOMALPHI, Indonesia juga berperan dalam mempromosikan pendekatan yang lebih humanis, seperti program deradikalisasi dan rehabilitasi bagi mantan anggota kelompok teroris. Dalam rangka melindungi kemananan nasional dari ancaman gerakan terorisme. Pemerintah Indonesia menanggapi masalah terorisme dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terukur dalam

<p>DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Vol. 1, No. 1 Tahun 2024 Hal. 262-272 e-ISSN: DOI: 10.36859/dgsj.v1i1.2885</p>	<p>Article History: Submitted: Sept 10, 2024 Accepted: Oct 24, 2024 Published: Oct 27, 2024</p>
---	--

kerangka kebijakan kontra terorisme yang tersusun dalam strategi komprehensif yang dilakukan dengan menggunakan *soft approach* dan *hard approach* yang melibatkan berbagai lapisan elemen bangsa, yakni pengerahan sipil dan militer.

Strategi penanganan terorisme di Indonesia dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai *leading sector* dalam aksi melawan teror, landasan berdiri dan kewenangan BNPT diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 tahun 2012 serta Peraturan Presiden No. 46 tahun 2010 di mana secara garis besar BNPT bertanggungjawab dalam merumuskan kebijakan dan strategi, mengkoordinasi lembaga-lembaga terkait, serta mengimplementasikan program yang telah disusun lewat unit-unit khusus yang telah dibentuk. Lebih lanjut, wujud lain dari keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah terorisme adalah dengan pengerahan elemen militer sebagai bagian dari rangkaian strategi untuk melawan kelompok-kelompok teroris ini, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme khususnya di pasal 43I ayat (1) yang menyatakan ‘Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang (UU No 5 Tahun 2018).

Sehubungan dengan strategi Indonesia dalam penanganan kontra terorisme di forum INDOMALPHI, terdapat beberapa literatur yang dapat di jadikan sebagai rujukan, seperti penelitian (Rizky, 2019) yang menjelaskan jika model pendekatan yang umumnya digunakan dalam menangani masalah terorisme, yakni *criminal justice system* dan *war model*. Sedangkan hasil penelitian (Rifana, 2019) yang menjelaskan pengerahan militer dalam kebijakan kontar terorisme merupakan hasil dari respon reaktif pemerintah terhadap masalah terorisme yang tidak lagi bisa ditangani dengan menggunakan *soft approach*, artinya dalam kondisi ini ancaman terorisme tidak lagi bisa ditangani oleh pihak Kepolisian sebagai penegak hukum dan membutuhkan pendekatan yang lebih keras.

Mengacu kepada fenomena di pendahuluan serta penelitian sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam strategi yang diterapkan oleh Indonesia dalam forum INDOMALPHI selama periode 2017 hingga 2021. Fokus penelitian akan meliputi analisis terhadap efektivitas kerjasama trilateral dalam mengurangi ancaman terorisme di kawasan, serta evaluasi terhadap implementasi strategi-strategi yang telah diadopsi oleh Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan

mengeksplorasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi tersebut, serta mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efektivitas kerjasama di masa mendatang.

KERANGKA ANALITIK

Dalam rangka memperkuat hasil analisis, peneliti menggunakan landasan konseptual sebagai alat untuk mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Peneliti menggunakan pendekatan Realisme klasik sebagai pisau analisis utama, serta penggunaan konsep-konsep turunan, yakni Keamanan Nasional dan Terorisme untuk memberikan penjelasan secara kritis mengenai fenomena permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Neo-Realisme

Neo-realisme meyakini bahwa variabel yang paling signifikan dalam urusan internasional adalah kekuatan atau kekuasaan (*Power*) (Kenneth Waltz, 2010). Neo-realisme memiliki keyakinan fundamental yang sama bahwa tatanan internasional secara inheren bersifat anarkis dan bahwa tidak ada otoritas supranasional yang menyatukan semua bangsa. Lebih lanjut, terdapat tiga aspek utama yang membuat negara saling mewaspadaikan satu sama lain yakni: 1) anarki, 2) fakta bahwa negara selalu memiliki beberapa tingkat kemampuan militer ofensif, dan 3) fakta bahwa negara tidak pernah bisa memastikan niat negara lain (John, 2014).

2. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional dilakukan dengan satu atau lebih negara yang berlandaskan tujuan atau kepentingan yang sama. Menurut K.J Holsti (1998), kerjasama pada awalnya terjadi karena berbagai macam permasalahan nasional, regional dan global yang muncul membutuhkan perhatian tidak hanya satu negara, kemudian setiap negara melakukan pendekatan ke masing-masing negara dengan membawa saran atau usulan penyelesaian masalah, negosiasi atau tawar menawar-menawarkan, merundingkan, menyimpulkan kumpulan bukti untuk membenarkan salah satu proposal yang telah diberikan, dan setelah itu diakhiri dengan kesepakatan yang pada akhirnya memuaskan semua pihak. Kerjasama internasional dapat dicirikan sebagai berikut, menurut K.J. Holsti (1998) :

- 1) Gagasan bahwa ketika dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan bertepatan, sesuatu dapat dipromosikan atau dicapai oleh semua pihak secara bersamaan.
- 2) Keyakinan atau antisipasi suatu bangsa bahwa keputusan yang dibuat oleh bangsa lain akan membantu memajukan kepentingan dan cita-citanya.
- 3) Kesepakatan atau perhatian khusus antara dua negara atau lebih untuk mendapatkan keuntungan dari konflik kepentingan atau kepentingan bersama.
- 4) Panduan resmi atau tidak resmi untuk transaksi yang akan datang dibuat untuk menegakkan kesepakatan.
- 5) Transaksi internasional untuk melaksanakan perjanjian

3. Keamanan Nasional

Dalam konsep keamanan nasional tindakan negara selalu didorong oleh motivasi untuk meningkatkan keamanan. Keamanan nasional dibentuk oleh faktor eksternal dan internal, oleh karena itu keamanan nasional terbentuk sebagai upaya negara untuk bisa bertahan dalam situasi internasional yang dipenuhi oleh konflik seiring dengan system internasional yang selara alamiah berbentuk anarki, sehingga dengan demikian negara harus memiliki kapabilitas untuk bisa memastikan keberlangsungannya dengan mengidentifikasi potensi-potensi bentuk ancaman (Matthew, Michael dan Rory, 2017)

4. Konsep Terorisme

Secara umum, aksi teror dilakukan dalam rangka untuk menimbulkan ketakutan, dalam rangka mengidentifikasi tindakan yang digolongkan sebagai bentuk dari terorisme. Sementara UU No.5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

5. Teori Peran

Isabelle Duyvesten (2008) menjabarkan setidaknya ada enam peran yang dapat dipenuhi militer dalam strategi penanganan terorisme, yakni: 1.) Pendampingan dan perlindungan; 2.) Penangkalan 3.) Deterrence; 4.) *Retaliation*; 5.) *Decapitation and Assassination*; 6.)

Perang. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengelompokan peran ke dalam tema yang lebih luas, dapat meliputi Penangkalan, Pencegahan, dan Penindakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data dengan mencari dan menggunakan data yang bersumber dari kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan penelaahan literatur atau referensi baik yang bersumber artikel jurnal, surat kabar, majalah, internet, maupun literatur lain yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, sedangkan untuk analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

PEMBAHASAN

Kerjasama trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang difasilitasi melalui forum INDOMALPHI sejak 2017 bertujuan untuk menghadapi ancaman terorisme dan kejahatan lintas batas di kawasan Laut Sulu. Kerjasama trilateral yang awalnya dimulai melalui peluncuran patroli maritim trilateral di Tarakan, Indonesia, pada Juni 2017. Kerjasama ini diinisiasi oleh Indonesia untuk mengatasi ancaman terorisme khususnya dalam lingkup maritim yang terus meluas yaitu perampokan bersenjata di laut sekitar Sulu. Melalui kerjasama tersebut, ketiga negara memfasilitasi pertukaran informasi intelijen tentang terorisme atau dengan kata lain ketiga negara membuka saluran komunikasi yang tentunya bermanfaat dalam melakukan penangkalan serta pencegahan aksi terorisme di wilayah mereka (Chandra, 2017).

Setelah menuai keberhasilan dalam menjalankan kerjasama di lingkup maritim tersebut, ketiga negara kemudian bersepakat untuk melakukan peluncuran patroli udara bersama di Subang, Malaysia, pada Oktober 2017 (Kemenhan, 2017) yang kemudian diikuti dengan peresmian pusat koordinasi militer di Tarakan, Indonesia; Tawau, Malaysia; dan Bongao, Filipina (Raymund, 2018). Peluncuran Patroli Udara Trilateral ini merupakan kelanjutan dari kerjasama Trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam area yang menjadi perhatian bersama di Laut Sulu dan menjadi upaya nyata dari tindakan bersama melawan kelompok teroris yang terkonsentrasi di Filipina Selatan. Dengan demikian patroli udara bersama ini melengkapi patroli maritim di Laut Sulu yang

tidak hanya rawan terhadap ancaman terorisme tetapi juga pembajakan dan perdagangan orang (Kemhan, 2017).

Dalam Kerjasama Trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina Tentara Nasional Indonesia (TNI) memainkan peran kunci dalam mendukung pencegahan, penangkalan, dan penindakan terorisme melalui berbagai inisiatif militer dan non-militer. Pencegahan adalah salah satu langkah penting dalam upaya kontra-terorisme, yang bertujuan untuk menghentikan munculnya ancaman sebelum berkembang menjadi tindakan kekerasan. Dalam kerangka kerja INDOMALPHI, TNI berperan aktif dalam mencegah masuknya kelompok-kelompok teroris, seperti Abu Sayyaf, dari Filipina selatan yang diketahui sering beroperasi di wilayah perbatasan laut antara ketiga negara. Peran utama TNI dalam pencegahan terorisme di kawasan ini meliputi:

1. **Patroli Maritim dan Udara Terpadu :** TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan TNI Angkatan Udara (TNI AU) secara rutin melakukan patroli maritim dan udara di wilayah perbatasan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Patroli gabungan ini dilakukan bersama dengan angkatan bersenjata Malaysia dan Filipina sebagai bagian dari program Trilateral Maritime Patrol (TMP), yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan mencegah infiltrasi teroris lintas batas (Chandra, 2017).
2. **Pertukaran Informasi Intelijen :** Sebagai bagian dari kerjasama trilateral, TNI juga berperan dalam pertukaran informasi intelijen yang diperoleh dari operasi pengawasan, investigasi, dan jaringan intelijen. Hal ini memungkinkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk memetakan rute-rute penyelundupan yang sering digunakan oleh kelompok teroris serta mendeteksi potensi ancaman sedini mungkin (Chandra, 2017). Indonesia juga mengikuti prakarsa pembentukan *Our Eyes* pada 2018 di level kawasan yang bertujuan untuk membendung penyebaran ancaman terorisme dan radikalisme di negara-negara Asia Tenggara lewat pertukaran informasi di antara *Senior Defense Official* negara-negara anggota yang akan diadakan setiap dua minggu sekali.
3. **Program Penguatan Kapasitas :** Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan, TNI turut serta dalam berbagai program pelatihan gabungan dengan angkatan bersenjata Malaysia dan Filipina. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan personel militer dalam menangani terorisme dan

kejahatan lintas batas, baik melalui latihan taktik tempur, operasi pengintaian, maupun operasi maritime (Wahyu, 2022).

Selanjutnya, penangkalan terorisme bertujuan untuk menghadirkan kekuatan pencegahan yang cukup kuat sehingga dalam menanggulangi masalah terorisme, strategi kontra-terorisme yang digunakan Indonesia dan sesuai dengan hasil kerjasama trilateral dengan Malaysia dan Filipina khususnya dalam konteks penerapan pendekatan holistik, komprehensif dan terintegrasi di setiap level, diaplikasikan dengan berlandaskan pada perspektif *state-centric* dengan membentuk pemahaman terorisme sebagai bagian dari ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan dimana TNI memainkan peran penting dalam penangkalan terorisme yang meliputi :

1. Latihan Militer Gabungan: TNI secara rutin mengadakan latihan militer gabungan dengan Angkatan Bersenjata Malaysia (ATM) dan Filipina (AFP), baik di darat, laut, maupun udara. Latihan ini bertujuan untuk mensimulasikan skenario serangan teror dan menyiapkan angkatan bersenjata ketiga negara dalam merespon ancaman dengan cepat dan efektif. Salah satu latihan yang menonjol adalah Trilateral Land Patrol (TLP) yang dilakukan di wilayah perbatasan darat untuk mencegah infiltrasi teroris melalui jalur darat (Elik, 2022).
2. Keberadaan Militer di Wilayah Perbatasan: Kehadiran militer yang konsisten di wilayah perbatasan, terutama di pos-pos maritim dan pulau-pulau terluar Indonesia seperti di perairan Kalimantan dan Sulawesi, menjadi upaya penangkalan yang efektif. TNI mendirikan pos pengamanan dan memperkuat kehadiran kapal patroli yang dilengkapi dengan sistem radar untuk mendeteksi aktivitas teroris di perairan (Elik, 2022).
3. Diplomasi Pertahanan: TNI juga terlibat dalam diplomasi pertahanan untuk memperkuat kerjasama keamanan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Melalui dialog dan konferensi militer di tingkat tinggi, ketiga negara mempererat hubungan strategis yang mendukung stabilitas regional dan menurunkan risiko serangan teroris lintas batas (Elik, 2022).

Penindakan adalah langkah akhir yang melibatkan operasi militer langsung untuk menindak kelompok-kelompok teroris yang terlibat dalam serangan atau aktivitas

kejahatan lintas batas. Dalam konteks ini, TNI memainkan peran penting dalam (Hough, 2004):

1. Operasi Militer Terpadu: TNI terlibat dalam operasi militer terpadu yang dilaksanakan bersama angkatan bersenjata Malaysia dan Filipina. Salah satu operasi yang signifikan adalah operasi gabungan dalam menangani kelompok Abu Sayyaf dan kelompok teroris lainnya yang beroperasi di Laut Sulu dan sekitarnya. Operasi ini mencakup penggerebekan terhadap kamp-kamp teroris, penangkapan tokoh-tokoh kunci, serta operasi penyelamatan sandera.
2. Respons Cepat Terhadap Insiden Terorisme: Melalui koordinasi yang erat dengan angkatan bersenjata negara tetangga, TNI mampu merespon dengan cepat terhadap insiden teroris yang terjadi di wilayah perbatasan. Misalnya, dalam kasus penculikan warga Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf, TNI bekerjasama dengan Filipina untuk melakukan operasi penyelamatan sandera yang melibatkan pasukan khusus.
3. Pengamanan Jalur Laut dan Udara: Selain berperan dalam operasi militer darat, TNI juga berperan dalam menjaga keamanan jalur transportasi laut dan udara yang sering dijadikan target oleh kelompok teroris. TNI Angkatan Laut secara aktif melakukan operasi pengamanan di jalur-jalur strategis, sementara TNI Angkatan Udara memantau pergerakan udara di wilayah-wilayah yang rentan terhadap aktivitas terorisme.

KESIMPULAN

Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kerjasama trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina melalui forum INDOMALPHI sangat signifikan dalam menghadapi ancaman terorisme lintas batas di kawasan Laut Sulu dan sekitarnya. Melalui berbagai inisiatif militer dan non-militer, TNI telah berperan aktif dalam mencegah, menangkal, dan menindak kelompok-kelompok teroris yang mengancam keamanan di kawasan tersebut. Dalam pencegahan terorisme, TNI memainkan peran penting dalam patroli maritim terpadu, pertukaran informasi intelijen, dan penguatan kapasitas melalui latihan bersama. Upaya ini membantu mendeteksi potensi ancaman terorisme sebelum berkembang menjadi serangan yang nyata. Selain itu, kehadiran TNI di wilayah perbatasan dan patroli gabungan telah berkontribusi besar dalam menangkis infiltrasi

kelompok teroris, yang secara langsung memperkuat langkah penangkalan. Di bidang penindakan, TNI secara efektif terlibat dalam operasi militer gabungan yang bertujuan untuk menindak langsung kelompok-kelompok teroris yang terlibat dalam aktivitas kejahatan lintas batas, termasuk penggerebakan dan operasi penyelamatan sandera. Koordinasi respons cepat terhadap insiden terorisme serta pengamanan jalur laut dan udara telah memperkuat keamanan kawasan dan mengurangi ancaman terorisme. Meskipun telah menunjukkan kemajuan signifikan, tantangan seperti koordinasi operasional dan kondisi geografis yang sulit masih menjadi kendala. Ke depan, peningkatan infrastruktur teknologi, pengembangan patroli bersama, serta keterlibatan masyarakat lokal akan menjadi elemen penting untuk memperkuat efektivitas kerjasama ini. Secara keseluruhan, peran TNI dalam kerjasama trilateral ini sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional, serta menjadi contoh bagi upaya kontra-terorisme di Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- P. Hough. (2004). *Understanding Global security 2nd Ed.* Routledge: New York
- DW. (2018). *Malaysia Tangkap Tiga WNI Tersangka Teroris.* Internet, 17 Agustus 2023, <https://www.dw.com/id/malaysia-tangkap-tiga-wni-tersangka-teroris/a-44741116>
- Elik Susanto. (2017). *Halau Gerakan ISIS dari Marawi TNI Kerahkan Kapal Perang di Sini.*
- Tempo, diakses pada 20 Juni 2022, <https://nasional.tempo.co/read/881461/halau-gerakan-isis-dari-marawi-tni-kerahkan-kapal-perang-di-sini>
- Wahyu Sudoyo. (2021) *BNPT Tingkatkan Kemampuan Penanggulangan Terorisme TNI-Polri di Jawa Timur*, diakses pada 12 Juni 2022.
- Tom Allard. (2018) *Southeast Asian states launch intelligence pact to counter Islamist threat.* Diakses pada 13 Juni 2022, <https://www.reuters.com/article/us-asia-intelligence-idUSKBN1FE163>
- M. Chandra W. Yudha. (2017). *Trilateral Maritime Security Cooperation Indonesia-Malaysia- The Philippines.* Jakarta: Kementerian Luar Negeri
- Raymund Jose G. Quilop. (2018). *Trilateral Co-operation by Indonesia, Malaysia and the Philippines: Temper Expectations.* *Global Asia* Vol. 13 No 3.

DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Vol. 1, No. 1 Tahun 2024 Hal. 262-272 e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v1i1.2885	Article History: Submitted: Sept 10, 2024 Accepted: Oct 24, 2024 Published: Oct 27, 2024
---	---

- Kemhan RI. (2017). *RI – Malaysia – Filipina Kerjasama Patroli Udara Trilateral untuk Jaga Wilayah Perbatasan*, <https://www.kemhan.go.id/2017/10/12/11015.html>
- M. Chandra W. Yudha. (2017). *Trilateral Maritime Security Cooperation Indonesia-Malaysia- The Philippines*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri
- Isabelle Duyvesteyn. (2008). *Great expectations: the use of armed force to combat terrorism*. *Small Wars & Insurgencies*, 19 (3).
- Matthew Sussex, Michael Clarke & Rory Medcalf. (2017) *National security: between theory and practice*. *Australian Journal of International Affairs* 71 (5).
- K.J. Holsti. (1998). *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisa*. Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga
- John J. Mearsheimer. (2014). *The tragedy of great power politics*. New York: WW Norton & Company.
- Kenneth Waltz. (2010). *Theory of International Politics*. Illinois: Waveland Press
- Rifana Meika Triskaputri. (2019). *Pelibatan Militer Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia*. *Journal of Terrorism Studies* 1 (1), Universitas Indonesia: Jakarta
- Rizky Ihsan. (2019). *Peran Militer dalam Kontra-terorisme di Indonesia*. *Jurnal Kriminologi Deviance* 3 (1). Universitas Budi Luhur: Jakarta
- UU No 5 Tahun 2018. *Kementerian Koordinator Pertahanan, Maritim, dan Keamanan RI*, diakses pada 7 Juni 2022, <https://jdih.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/2019-08/UU%20Nomor%205%20Tahun%202018.pdf>
- Ach Fawaidi. (2021). *Kilas Balik Bom Bali 2002, 19 Tahun Silam Ledakan Dahsyat Guncang Kuta dan Denpasar*, diakses pada 1 Juni 2022, <https://regional.kompas.com/read/2021/10/12/095900878/kilas-balik-bom-bali-2002-19-tahun-silam-ledakan-dahsyat-guncang-kuta-dan?page=all>
- Andhika Chrisnayudhanto. (2022). *Indonesia's National Plan of Action on Countering Violent Extremist that Leads to Terrorism*. BNPT, Internet, diakses pada 7 Juni 2022, <https://strongcitiesnetwork.org/en/wp-content/uploads/2018/08/Chrisnayudhanto-Indonesia.pdf>